

Strategi Perimbangan Amerika Serikat di Asia Pasifik terhadap Tiongkok melalui Kebijakan Ekonomi Pada Periode 2017 – 2019

Deasifa Aqmarina¹
Anggun Puspitasari²

Abstract

This study aims to analyze the strategy of The U.S's Rebalancing by economic policy in Asia Pacific. To analyzing the case, the author use concepts such as, Grand Strategy and Balance of Influence from experts who are relevant to the phenomenon under study. This research uses the descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the U.S manage to be a hegemony in the Asia Pacific region uses a balance of influence strategy's by forming Free and Open Indo-Pacific (FOIP), and increased cooperation with Australia, Japan, and India, that the initiative as a grand strategy of the U.S to the China's Belt and Road Initiative (BRI), which is decreased influence to hegemony US in the Asia Pacific region.

Keywords: *Asia Pacific, balancing, China, economic, United States.*

Pendahuluan

Amerika Serikat menjadi negara hegemoni sejak kemenangannya pada Perang Dunia ke-2 atas Uni Soviet, bahwa Amerika Serikat menjadi *influencer* bagi negara lain. Amerika Serikat juga dianggap sebagai kiblat bagi negara-negara lain, mulai dari mata uang, industri, teknologi hingga budaya. Amerika Serikat turut aktif dalam mengatur tatanan regional di beberapa kawasan. Amerika Serikat menjadi wasit dalam konflik antar negara yang terjadi, yakni berperan menjadi media penengah antar negara konflik. Pada saat itu sistem internasional yang terbentuk yaitu sistem kapitalisme yang berkembang. Selanjutnya muncul kekuatan baru di dunia yang menggabungkan sistem kapitalisme dengan sosialisme, yakni Tiongkok.

¹ Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Email: deashifa.aqmarina@gmail.com.

² Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Hubungan Amerika – Tiongkok secara formal diawali pada 1 Januari 1979. Tiongkok memperoleh banyak keuntungan atas hubungannya dengan Amerika, seperti meningkatnya perdagangan, partisipasi damai dalam keseimbangan global, dan mencegah ancaman agresi dari Uni Soviet. Tiongkok semakin bergantung pada Amerika Serikat dalam perbaikan ekonomi negaranya. Tiongkok sebagai negara komunis berkembang maju dalam sistem perekonomian dunia sejak era Pemerintahan Deng Xiaoping.

Tiongkok mulai menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Pasifik. Tiongkok berhasil memajukan perekonomiannya dalam waktu singkat sehingga tidak sedikit perekonomian negara di kawasan tersebut ikut terpengaruh pada Tiongkok. Asia Pasifik berisikan negara-negara yang kaya sumber daya alam terutama wilayah laut yang menjadi sumber kehidupan ekonomi dan pertahanan bagi wilayah lainnya. Asia Pasifik menjadi kawasan yang dihuni oleh negara-negara dengan perekonomian yang kuat, industri yang maju dan baru, serta menjadi tempat tinggal dari 40% penduduk dunia. Kawasan ini memiliki sekitar 54% PDB dunia, 44% aktivitas perdagangan dunia, dan memiliki beberapa jalur perdagangan yang penting. Jadi wajar saja jika Asia Pasifik menjadi tujuan utama ajang kontestasi kedua negara adidaya.

Dalam bidang ekonomi, negara di kawasan mengalami dilema atas pengaruh dari kedua negara adidaya tersebut. Amerika Serikat membentuk sebuah strategi yang tidak hanya untuk menaikkan kembali koeksistensi yang sempat menurun tetapi juga untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Pada awal masa pemerintahan Donald Trump tahun 2017, Amerika Serikat meninggalkan kerja sama regional terbesar di kawasan, *Trans-Pacific Partnership*, yang dinilai Tiongkok sebagai kesempatan bagi dirinya hadir menggantikan kehadiran AS. Melihat hal tersebut, AS membuat kebijakan baru yaitu *America First toward Indo-Pacific*. AS mencoba menghalangi proyek ekonomi terbesar Tiongkok yang berpengaruh di kawasan yaitu *One Belt One Road (OBOR)* atau *Belt and Road Initiative (BRI)*. AS juga memastikan kontrol akses pada sumber daya alam, ekspansi pada target pasar, dan keamanan jalur komunikasi laut (*Sea Line of Communications*), serta mempromosikan kebebasan navigasi dan penerbangan di seluruh kawasan, seperti di Laut Tiongkok Selatan.

Dari uraian tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana Amerika Serikat melakukan strategi perimbangan melalui kebijakan ekonomi di Asia Pasifik periode 2017 – 2019 terhadap Tiongkok?"

Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti menganalisis mengenai kebijakan ekonomi AS menjadi strategi perimbangannya terhadap Tiongkok di Asia Pasifik. *Grand strategy* menjadi acuan peneliti dalam menggambarkan tujuan strategi AS di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi pengaruh Tiongkok. Sedangkan *balance of influence* untuk menggambarkan kebijakan ekonomi AS atas perimbangan pengaruh Tiongkok kepada negara-negara di kawasan. Peneliti berargumen bahwa *America First toward Indo-Pacific* menjadi *grandstrategy* AS di Asia Pasifik dengan memperluas jangkauan pengaruh ke Indo-Pasifik. AS telah membuat kebijakan ekonomi di Indo-Pasifik dengan konsep *Free Open Indo-Pacific* untuk mengimbangi pengaruh *Belt and Road Initiative* Tiongkok di kawasan.

Kawasan Indo-Pasifik dianggap menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan kelas dunia dan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global. Anggapan tersebut dikarenakan tatanan regional Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka dan dapat memastikan stabilitas kawasan yang seimbang bagi negara berdaulat. AS menjadi sumber investasi asing (*FDI*) terbesar di Indo-Pasifik dan ia memperkuat hubungan kemitraan dalam membantu perdamaian kawasan. Kemudian AS berkomitmen untuk menegakkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (*FOIP*) di kawasan yang mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan hukum internasional dari persaingan yang adil. (*Department of state US*, 2019: 5).

Kemunculan AS sebagai negara hegemoni dimulai pasca Perang Dunia II dikarenakan terbentuknya tatanan internasional melalui PBB, Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO yang menunjukkan kemampuan AS, sementara komitmen dalam bantuan internasional melalui *Marshall Plan* menunjukkan kemauannya menjadi hegemoni. Kenyataan ini memberikan sinyal kepada negara-negara di dunia bahwa era pasca Perang Dunia II merupakan era kejayaan AS atau *Pax Americana*. Tujuan strategis pemimpin AS yaitu mencegah Tiongkok mendirikan hegemoni di Asia-Pasifik. Dalam buku *By More than Providence: Grand Strategy and American Power in Asia Pacific since 1783*, J. Green mengatakan bahwa jika ada satu sentral dalam budaya strategis Amerika ke Timur, AS tidak akan mentolerir kekuatan lain membangun hegemonik atas Asia Pasifik. (Takahashi, 2020).

Kebijakan luar negeri era Trump menggabungkan prinsip neo-isolasionis dan *selective engagement* yang disebut *selective isolationism*. (Wardhana, 2019). Hal ini dapat dilihat melalui dua tahap, yaitu reorientasi kebijakan luar negeri dan pengurangan komitmen internasional. Kemudian Trump mengeluarkan slogan "*America First*" dan "*Make America Great Again*". Dalam retorikanya slogan tersebut kontradiktif dengan status Amerika sebagai hegemoni. Dalam praktiknya, Trump semakin gencar dalam kebijakannya, dengan memberlakukan hambatan tarif barang yang masuk ke Amerika, meninggalkan TPP, dan renegotiasi NAFTA. Kepentingan nasional AS tertulis dalam *National Security Strategy 2017* dengan judul *America First*, menjelaskan empat prioritas utama kepentingan nasional yaitu, melindungi rakyat, tanah air serta jalan hidup AS, mempromosikan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat AS, menjaga perdamaian melalui kekuatan, dan meningkatkan pengaruh AS di dunia (NSS AS, 2017).



Gambar 1. Peta Asia Pasifik dan Indo Pasifik
Sumber: China US Focus, 2017.

Hubungan AS-Tiongkok

Berdasarkan peringkat *Global Innovation Index* tahun 2019, AS menempatkan urutan ke-3 dengan pendapatan perkapita \$ 62,605.6 yang jauh lebih unggul dibanding Tiongkok yang hanya sebesar \$ 25,313.3 berada di urutan ke-14. (GII, 2019). Tiongkok berupaya meningkatkan perekonomiannya melalui proyek infrastruktur terbesarnya yang dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI), bahwa pembangunan infrastruktur menjadi poros baru geopolitik. Pada 14 Mei 2017, BRI secara resmi sebagai inisiatif global. BRI menjadi salah satu sarana Tiongkok dalam memajukan tujuan diplomatik dan strategis, mengkonsolidasikan posisi Tiongkok di Eurasia sehingga menggeser posisi AS di dunia. BRI terdiri dari dua segmen besar: (1) Jalur Sutra Ekonomi, rute darat dimulai dari Tiongkok barat yang melewati Asia Tengah berlanjut ke Timur Tengah; dan (2) Jalur Sutra Maritim, rute maritim mengelilingi Asia Tenggara, Teluk Persia, dan Tanduk Afrika. Secara keseluruhan, ini mencakup lebih dua pertiga populasi dunia dan lebih sepertiga dari *output* ekonomi global serta melibatkan investasi Tiongkok dengan total sebesar \$ 4 triliun. Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) bersama dengan *Silk Road Fund* dan *New Development Bank* menjadi sumber dana BRI Tiongkok. (Parameswaran, 2017).



Gambar 2. Jalur Sutra Ekonomi dan Maritim *Belt Road Initiative* Tiongkok
Sumber: China.org.cn, 2017.

Keseimbangan pengaruh Indo-Pasifik tergantung pada tindakan Amerika Serikat, Tiongkok, dan kekuatan lainnya seperti Jepang dan India. Bahkan ketika Tiongkok bersaing dengan AS, AS dapat mempertahankan kepemimpinannya yang signifikan dalam kekuatan militer dan ekonomi. AS akan terus menjadi negara terkaya di dunia (diukur dengan aset bersih), pemimpin dunia dalam teknologi dan inovasi, dan rumah bagi pasar keuangan di dunia. (*White Paper Australia*, 2017). Kebijakan jangka panjang Amerika Serikat dalam *FOIP* mengaitkan keterlibatan ekonomi dan keamanannya di Indo-Pasifik. Sebagian besar negara di kawasan menganggap peran penting AS di Indo-Pasifik sebagai pengaruh stabilisasi. Jepang dan India, kekuatan ekonomi dan militer utama, juga memainkan peran dalam masalah keamanan dan politik Indo-Pasifik dan berusaha mempengaruhi keseimbangan tatanan regional.

Pengejaran konektivitas AS tercermin dalam pernyataan Trump di KTT APEC 2017 di Vietnam, bahwa Trump mendukung lembaga keuangan multilateral, WTO dan ADB, sebagai upaya dalam investasi infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Pitakdumrongkit, 2019: 11). AS mendorong investasi sektor swasta dalam ekonomi regional dan memberikan alternatif yang kuat untuk BRI Tiongkok. AS membentuk kembali *Quadrilateral Security Dialogue* sebagai pendukung kebijakan *FOIP* sekaligus sebagai pengawas kebijakan Tiongkok di kawasan.³ Negara-negara di Asia Tenggara khawatir mengenai penyesuaian status quo teritorial Tiongkok dan keberhasilannya dalam sentralitas ASEAN. Namun, ASEAN memilih tatanan regional yang *multipolar*, bahwa *Quad* tetap aktif sebagai penyeimbang geopolitik dan geoekonomi terhadap kebangkitan Tiongkok. Perdana Menteri Modi, dalam Dialog Shangri-La 2018, mengatakan bahwa masa depan strategis Asia adalah pasca-Amerika yang belum didominasi oleh Tiongkok karena negara kekuatan menengah siap berkontribusi terhadap kebijakan *FOIP*. (Smith, 2018: 236).

³ *Quadrilateral Security Dialogue* atau yang dikenal dengan *Quad* merupakan *platform* yang dibentuk Presiden Abe, Jepang, pada tahun 2007 untuk melawan Tiongkok. Namun Tiongkok menentang *Quad* membuat perlawanan sehingga *Quad* tidak aktif lagi.

Pemerintah AS percaya keuntungan ekonomi suatu negara dapat meningkatkan keamanannya. Dalam *National Security Strategy 2017*, AS menciptakan tata kelola ekonomi bahwa ia mendorong kerja sama regional bebas dan terbuka, praktik pembiayaan infrastruktur transparan, dan resolusi damai dari perselisihan, mengejar perjanjian perdagangan bilateral atas dasar yang adil dan timbal balik, mencari akses yang dapat diandalkan untuk ekspor Amerika, bekerja dengan mitra membangun jaringan negara yang didedikasikan untuk pasar bebas dan terlindungi dari kekuatan yang merusak kedaulatan, memperkuat hubungan dengan sekutu pada infrastruktur berkualitas tinggi (NSS 2017, 47). Dalam NSS AS dikatakan bahwa Tiongkok berusaha untuk 'menggeser pengaruh' AS di kawasan Indo-Pasifik dengan memperluas jangkauan ekonomi. (AlSyahrin, 2018).

Hubungan Multilateral dan Bilateral AS di Asia Pasifik

ASEAN berada di pusat geografis Indo-Pasifik dan juga pusat dari strategi *FOIP*. AS melihat konvergensi antara prinsip-prinsip dalam *Outlook Indo-Pacific ASEAN* yang memiliki inklusivitas, keterbukaan, tata kelola yang baik, dan patuh terhadap hukum internasional dengan visi *FOIP AS*, serta pendekatan regional bagi sekutu dan mitra. (*Outlook Indo-Pacific ASEAN*, 2019). Bantuan teknis AS terhadap ASEAN antara lain dalam memperkuat kapasitas sektor energi, mempromosikan pendekatan terhadap *cyber security* dan perdagangan digital, dan menciptakan peluang bagi perusahaan kecil dan menengah. Sebagai eksportir, pedagang, dan investor utama di Asia Tenggara, AS menjalin hubungan bilateral yang erat dengan negara di kawasan dan ASEAN secara kolektif menjadi pasar ekspor terbesar keempat AS. (*Department of state US*, 2019: 7-10).

AS juga bergabung dengan APEC⁴ dan Trump mendesak negara-negara APEC untuk menghindari tawaran investasi BRI Tiongkok yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan diminta untuk bekerja sama dengan *FOIP AS* yang tidak akan dibebani utang seperti yang dilakukan Tiongkok. (New York Times, 2018). AS membentuk U.S.-*Support for Economic Growth in Asia* (US-SEGA) untuk membangun APEC dengan membantu mitra melalui kebijakan perdagangan yang komprehensif dan investasi berstandar tinggi.⁵ AS juga mengesahkan *Asia Reassurance Initiative Act* (ARIA) dengan memberikan \$ 1,5 miliar untuk program AS di Asia Timur dan Asia Tenggara untuk mengembangkan strategi jangka panjang dan komprehensif dalam kebijakan AS di Indo-Pasifik. US-SEGA dan ARIA menjadi kebijakan ekonomi AS untuk meningkatkan pengaruh AS di Asia Pasifik.

⁴ Forum perdagangan regional terbesar di Asia Pasifik yang mewakili 60% dari ekonomi global, bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan digital, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan pasar layanan terbuka.

⁵ US-SEGA bertujuan melakukan perdagangan yang adil, membuka pasar bisnis, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi digital, reformasi struktural, perdagangan jasa di negara APEC dan Indo-Pasifik.

Di kawasan Samudera Hindia, AS membentuk dana infrastruktur sebesar \$ 113 juta sebagai cara menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan dengan mendukung *Indian Ocean Rim Association* (IORA). India menjadi mitra yang penting bagi AS dalam membatasi pergerakan Tiongkok karena India dinilai memiliki ekonomi yang akan melampaui pertumbuhan ekonomi dan demografi Tiongkok dalam BRI. Oleh karena itu, AS mendukung IORA untuk konektivitas pendanaan dan dukungan logistik yang menjadi bantuan alternatif di kawasan atas jebakan utang Tiongkok. AS juga memperkuat hubungan LMI (*Lower Mekong Initiative*).⁶ Untuk perkembangan wilayah Mekong, pada tahun 2012 AS mengumumkan strategi perimbangan pengaruh di Asia Pasifik, LMI 2020, di mana ia menjanjikan dukungan finansial untuk upaya konektivitas subregional.

AS juga melibatkan negara mitra untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan kawasan di Indo-Pasifik, bersama Australia, Jepang, dan India dengan membentuk kembali forum *Quadilateral Security Dialogue* (QSD) yang dikenal dengan *Quad*. Pada tahun 2017, *Quad* bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok dengan ancaman yang dibentuk oleh proliferasi Tiongkok sekaligus menjadi bagian dari strategi *FOIP* AS di kawasan. *Quad* menempatkan Tiongkok dalam posisi memengaruhi rute pengiriman global dan menempatkan *choke point* global di bawah tekanan. AS menyatakan bahwa ia tidak berinvestasi untuk memberikan pengaruh politik, melainkan mempraktikkan kemitraan ekonomi. AS percaya pada strategi kemitraan bukan dengan sistem ketergantungan. Jadi AS tidak pernah berkeinginan untuk mendominasi kawasan Indo-Pasifik dan akan menentang negara mana pun yang melakukannya, terutama Tiongkok (Smith, 2018: 241).

AS berkontribusi \$ 23 juta untuk *Papua New Guinea Electrification Partnership* (PEP) yang terhubung dalam 70% populasi PNG pada listrik di tahun 2030 dengan Australia, Jepang, dan Selandia Baru. (United States, 2019). AS juga memperluas kerja sama dengan Australia dan Selandia Baru dalam pembangunan infrastruktur Indo-Pasifik, operasi patroli bersama melawan *illegal fishing*, kolaborasi sains dan luar angkasa, dan mengamankan rantai pasokan mineral. (The Economic Times, 2019). AS mendukung kebijakan *Act East India* sebagai upaya penyeimbang pengaruh dari pengaruh BRI Tiongkok. India mendukung strategi AS yang bebas, terbuka, dan inklusif serta percaya bahwa *FOIP* didasarkan pada aturan yang kooperatif dan kolaboratif. Pada Dialog Shangri-La 2018, Perdana Menteri Modi, menyerukan nilai dan prinsip bersama serta mempromosikan aturan dasar di Indo-Pasifik dan bahkan adanya transformasi nama *Act East India* menjadi *Act Indo-Pacific* guna menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (The Print, 2020).

Peningkatan Kebijakan Ekonomi AS

Pada Forum Bisnis Indo-Pasifik pertama tahun 2018, AS meluncurkan beberapa inisiatif baru untuk mengkatalisasi investasi di Indo-Pasifik dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi melalui infrastruktur, energi, dan ekonomi digital. Trump menandatangani BUILD Act (*Better Utilization of Investments Leading to Development*) yang digunakan sebagai landasan hukum di Asia Pasifik. (CSIS, 2018). UU BUILD bertujuan untuk meningkatkan bantuan konektivitas AS dengan melakukan reformasi lembaga keuangan pembangunan dengan membentuk *Development Finance Corporation* (DFC). DFC akan mengasumsikan kegiatan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) dan *Development Credit Authority* (DCA) USAID.

⁶ Inisiatif AS yang dibentuk tahun 2009, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan pembangunan di Indo-Pasifik yang berfokus pada bidang keamanan energi dan air, infrastruktur yang berkelanjutan, dan institusi regional.

Pada Forum Bisnis Indo-Pasifik kedua tahun 2019, AS memajukan komitmen dalam bidang ekonomi yang dinamis di Indo-Pasifik. Para pemimpin negara membahas peluang komersial, ekonomi dan keamanan digital, energi, pengembangan infrastruktur, modal akses, dan kemitraan. AS memperkuat *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS), badan penyeimbang keamanan nasional AS dan ekonomi terbuka dalam pengawasan investasi Tiongkok untuk melindungi dari tindakan Tiongkok dengan menandatangani UU Modernisasi Tinjauan Risiko Investasi Asing (FIRRMA). Kemudian CFIUS meninjau implikasi keamanan nasional dari pengambilalihan asing, memblokir penjualan dari perusahaan pengiriman uang *moneygram* ke anak perusahaan dari teknologi terbesar Tiongkok, Alibaba. (Smith, 2018: 206).

AS memfasilitasi infrastruktur proyek-proyek di seluruh Indo-Pasifik melalui ADB dan WTO. (CSIS, 2019). Keterlibatan AS pada infrastruktur di Indo-Pasifik, diantaranya sebesar \$ 113,5 juta untuk inisiatif strategi yang terdiri dari \$ 30 juta untuk *Infrastructure Transaction and Assistance Network* (ITAN) 2018 dan *Transaction Advisory Fund* (TAF) 2019 di Indo-Pasifik. (Department of state US, 2019: 16). Kemudian *Blue Dot Network* (BDN) menjadi inisiatif baru yang diumumkan di Forum Bisnis Indo-Pasifik 2019.⁷ BDN menyatukan pemerintahan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan persetujuan yang diakui secara global dalam infrastruktur. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa BDN sebagai langkah membangun kepercayaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai bagian dari strategi perimbangan terhadap BRI Tiongkok, di mana pilihan nama *Blue* (biru) sangat kontras dengan *Red* (merah) BRI Tiongkok. (The Diplomat, 2020).

Selain itu, pada bidang energi, AS membentuk Asia EDGE pada Forum Bisnis Indo-Pasifik 2018. Asia EDGE memperkuat ketahanan energi, meningkatkan diversifikasi energi dan perdagangan, serta memperluas akses energi. Bentuk kerja sama energi AS di Indo-Pasifik, di antaranya: membina dialog perdagangan energi, memperluas kemampuan ekspor LNG, dan memperkuat kerja sama energi nuklir (Department of Energy, 2018). USAID menjalin kemitraan dengan ADB yaitu menandatangani perjanjian kerja sama *Asia Clean Energy Forum* (ACEF) untuk memobilisasi investasi sebesar \$ 7 miliar dalam proyek energi di Indo-Pasifik. AS berupaya meningkatkan kapasitas sistem energi bersih 6 gigawatt dan meningkatkan perdagangan energi regional sebesar 10% selama lima tahun ke depan. Hal tersebut melengkapi upaya *Green Invest Asia* USAID untuk menargetkan pengurangan 25 juta ton CO₂ emisi gas rumah kaca. Upaya tersebut dibangun atas sejarah produktif AS keterlibatan energi di Indo-Pasifik. (USAID, 2019).

Dalam bidang ekonomi digital, AS berkoordinasi dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan dalam kemitraan Konektivitas Digital dan Keamanan Siber yang dikenal dengan *Digital Partnership*, pada Forum Bisnis Indo Pasifik 2018. *Digital Partnership* mendukung industri, mempromosikan ekspor AS melalui misi dagang, dan pameran dagang. (Department of state US, 2019). *Digital Partnership* mendukung perdagangan online layanan digital di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Smart Cities Partnership* AS-ASEAN tahun 2018, investasi AS dalam infrastruktur digital dengan membantu kota-kota menggunakan data dalam mengatur teknologi untuk berinovasi mengelola sumber daya. (United States, 2020). AS menyadari bahwa tidak mungkin menghapus Tiongkok dalam aktivitas global, maka dari itu AS ingin membangun hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok.

⁷ BDN dibentuk oleh AS, Jepang, dan Australia, sejalan dengan kebijakan Bank Jepang untuk Kerja sama Internasional (JBIC), Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), dan Badan Pengembangan Keuangan AS (DFC).

Kesimpulan

Penelitian ini berjudul Strategi Perimbangan Amerika Serikat melalui Kebijakan Ekonomi terhadap Tiongkok di Asia Pasifik Periode 2017 – 2019. Tahun 2017 merupakan tahun yang menjadi momentum awal di mana Amerika Serikat mengalami perubahan baru. Hal tersebut dibuktikan melalui Kebijakan *America First toward Indo-Pacific* yang dikeluarkan oleh Presiden Donald J. Trump yang menjadi pemimpin baru negara hegemon Amerika Serikat. Momentum itu diawali dengan penarikan diri Amerika Serikat dari kemitraan terbesar di Asia Pasifik, yaitu *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik.

America First toward Indo-Pacific merupakan *grand strategy* AS di Asia Pasifik, yaitu mengubah dinamika politik internasional dari Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik. AS memfokuskan kebijakannya dalam *new security architecture* dan *economic strengthening*. *New Security Architecture* ditujukan AS menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan tetap mengupayakan *freedom of navigation* dan *overflight*, di mana wilayah tersebut menjadi persaingan strategis. Sedangkan *economic strengthening* ditujukan AS dalam menghadapi *Belt and Road Initiative* (BRI) yang menjadi proyek terbesar Tiongkok. Tiongkok mengambil kesempatan untuk menggantikan kehadiran AS di Asia Pasifik saat melihat AS yang sedang fokus pada hubungan bilateral.

Kebijakan BRI Tiongkok dinilai Amerika menjadi *debt-trap diplomacy* di kawasan. AS menggunakan strategi *Balance of Influence* melalui kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) untuk menawarkan jalan alternatif bagi negara-negara yang terlibat utang untuk menghindari pengaruh dari BRI Tiongkok. FOIP AS dalam bidang ekonomi dilakukan dengan penguatan infrastruktur melalui ITAN, energi melalui Asia EDGE dan ekonomi digital melalui *Digital Partnership*. Selain itu, AS membentuk *Quadrilateral Security Dialogue* (QDS atau *Quad*) sebagai forum khusus di Indo-Pasifik bersama dengan Jepang, Australia, dan India. AS melibatkan India sebagai bagian dari strategi perimbangan dengan menjadikan *proxy* AS di Samudera Hindia dalam membatasi pergerakan Tiongkok. Pada tahun 2019, AS menguatkan kembali visinya di Indo-pasifik dengan membentuk *Blue Dot Network* (BDN) bersama dengan Australia dan Jepang untuk bersaing dengan proyek BRI Tiongkok dalam infrastruktur global.

Namun, atas semua strategi yang dilakukan AS untuk hadir kembali di Asia Pasifik, hubungan dengan Tiongkok sampai saat ini masih bekerja sama dan saling menjaga rivalitas yang ada. Di Asia Pasifik, AS dan Tiongkok memiliki arti penting. AS sebagai jaminan keamanan dan Tiongkok sebagai jaminan ekonomi kawasan. Maka dari itu, peneliti berargumen bahwa AS-Tiongkok melihat upaya perluasan pengaruh di kawasan sebagai *zero sum game*. Peneliti juga berargumen bahwa skema hubungan pengaruh antara AS-Tiongkok di kawasan akan berlangsung lama, sampai AS dapat mengembalikan kepemimpinannya atau Tiongkok yang meningkatkan posisinya. Karena sebuah negara hegemoni ialah negara yang dapat menjaga stabilitas kawasan dengan memiliki kekuatan dan pengaruh yang unggul di semua bidang, terutama dalam bidang militer dan ekonomi.

Peneliti menyadari penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu peneliti berharap ke pada para peneliti selanjutnya untuk dapat membahas mengenai implementasi kebijakan ekonomi sebagai strategi perimbangan Amerika Serikat. Peneliti memandang ada salah satu aspek yang dikaji dalam membahas ekonomi Amerika Serikat yaitu infrastruktur di mana aspek ini sangat berpengaruh mengingat infrastruktur merupakan komponen utama dari perekonomian negara. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan periodisasi selanjutnya.

Referensi

- Australia Government. 2017. Foreign Policy White Paper: The United States and China.
- CSIS. (2018, 10 Desember). "Energy Opportunities under the Free and Open Indo-Pacific Vision." <https://www.csis.org/analysis/energy-opportunities-under-free-and-open-indo-pacific-vision> diakses pada 30 April 2020.
- Department of Energy. (2018, 30 Juli). "5 Ways the U.S. is Partnering with the Indo-Pacific Region on Energy." <https://www.energy.gov/articles/5-ways-us-partnering-indo-pacific-region-energy> diakses pada 22 April 2020.
- Department of state US of America. 2019. A free and Open Indo-Pacific: Advancing a shared vision.
- Global Innovation Index (GII). (2019). <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report#> diakses pada 25 Mei 2020.
- Parameswaran, Prashant. (2017). "The Real Trouble With China's Belt and Road" *The Diplomat*. 11 Mei, <https://thediplomat.com/2017/05/the-real-trouble-with-chinas-belt-and-road/> diakses pada 10 April 2020.
- Pitakdumrongkit, Kaewkamol Karen. (2019). *Policy Studies 79: The Impact of the Trump Administration's Indo Pacific Strategy on Regional Economic Governance*. Washington: East West Center.
- Smith, Jeff M. (2018). *Asia's Quest for Asia Balance: China's Rise and Balancing in the Indo-Pacific*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publisher.
- Takahashi, Keikichi. (2020). "How Unique Is Trump's China Policy?" <https://thediplomat.com/2020/06/how-unique-is-trumps-china-policy/> diakses pada 25 Juli 2020.
- The Diplomat*. (2020, 7 April). "Blue Dot Network: The belt and Road Alternative." <http://www.thediplomat.com/2020/04/blue-dot-network-the-belt-and-road-alternative> diakses 22 Mei 2020.
- The Economic Times*. (2019, 1 Juni). "Act East to Act Indo-Pacific: Agenda for the New Government." <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/act-east-to-act-indo-pacific-agenda-for-the-new-government/articleshow/69591279.cms?from=mdr> diakses pada 20 April 2020.
- The New York Times*. (2018, 18 November). "US and China Square Off on Trade. and APEC Nations Duck for Cover." <http://www.nytimes.com/2018/11/18/world/asia/apec-us-china-trade-war-joint-statement.html> diakses pada 10 Mei 2020.
- The Print*. (2020, 27 Maret). "India's Act East Policy is Slowly Becoming Act Indo-Pacific Policy under Modi Government." <http://theprint.in/pageturner/excerpt/india-act-east-policy-is-becoming-act-indo-pacific/389502> diakses pada 15 April 2020.
- United States. 2020. Economic Report of the President: Together with The Annual Report of the Council of Economic Advisers.
- USAID. (2019). "USAID Announces more than \$ 440 million in Assistance to the Indo-Pacific Region." <http://www.usaid.gov/news-information/press-releases/nov-4-2019-usaid-announces-more-440-million-assistance-indo-pacific-region> diakses pada 23 April 2020.
- Wardhana, Agastya & Vinsensio M. A. Dugis. (2019). Selective Isolationism Grand Strategy: United States Foreign Policy During Trump Administration. *Global Strategis* (2) : 141-156.